

## PILKADA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

**D**i Provinsi Sulawesi Utara diselenggarakan dua pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kedua kabupaten tersebut berhasil menerima anggaran pengawasan tepat waktu dengan jumlah yang berbeda. Kabupaten Bolaang Mongondow menerima sebesar Rp 10.928.650.000,00 dari pengajuan sejumlah Rp 11,9 miliar. Sementara, Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajukan anggaran pengawasan sebesar Rp 10,5 miliar dan menerima sejumlah Rp 8,6 miliar.

Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bawaslu menugaskan sejumlah pengawas mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat TPS. Pengawas yang bertugas di Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 596 orang yang terdiri 312 orang laki-laki dan 284 orang perempuan. Sedangkan pengawas yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe berjumlah 444 orang yang diisi oleh kebanyakan kaum laki-laki.

Berkenaan dengan dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye, di Kabupaten Bolaang Mongondow ditemukan lima dugaan mobilisasi PNS. Sementara, pada tahapan pemungutan suara berhasil ditemukan Form C6 sebanyak 3.775 lembar yang tidak terdistribusikan. Mengacu kepada hasil pengawasan, pelanggaran terbanyak di Kabupaten Bolaang Mongondow adalah pelanggaran administrasi dengan jumlah 12 kasus pelanggaran. Sedangkan, pelanggaran yang banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah pelanggaran pidana yang berjumlah 25 kasus pelanggaran. Pada tahapan kampanye di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditemukan empat dugaan penggunaan fasilitas negara, 12 dugaan mobilisasi PNS, dan dua dugaan politik uang dan kampanye pada masa tenang. Demikian pula, pada tahapan pemungutan suara ditemukan dua kasus pelanggaran dalam proses pemungutan suara yang menghasilkan satu rekomendasi Panwas. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilanjutkan untuk diadakan pemungutan suara ulang.



# PROVINSI SULAWESI UTARA

## Kabupaten Bolaang Mongondow



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	86.761
	Perempuan	80.790
DPTb	Laki-laki	1.798
	Perempuan	1.814
DPPH	Laki-laki	37
	Perempuan	21

Jumlah Pemilih Pemula	5.206
Jumlah Pemilih Disabilitas	86
Jumlah Pemilih TMS	19.661



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	1	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 11.900.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 10.928.650.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
69.064	65.736	1.796	1.814	37	21	70.897	67.571	137.342	1.126	77	



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	3775
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	5
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			1	2	39	6	122	80	150	196



Pencalonan (Tahapan) 0

**SENGKETA**

Hasil 0

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 12

Pelanggaran Pidana 1

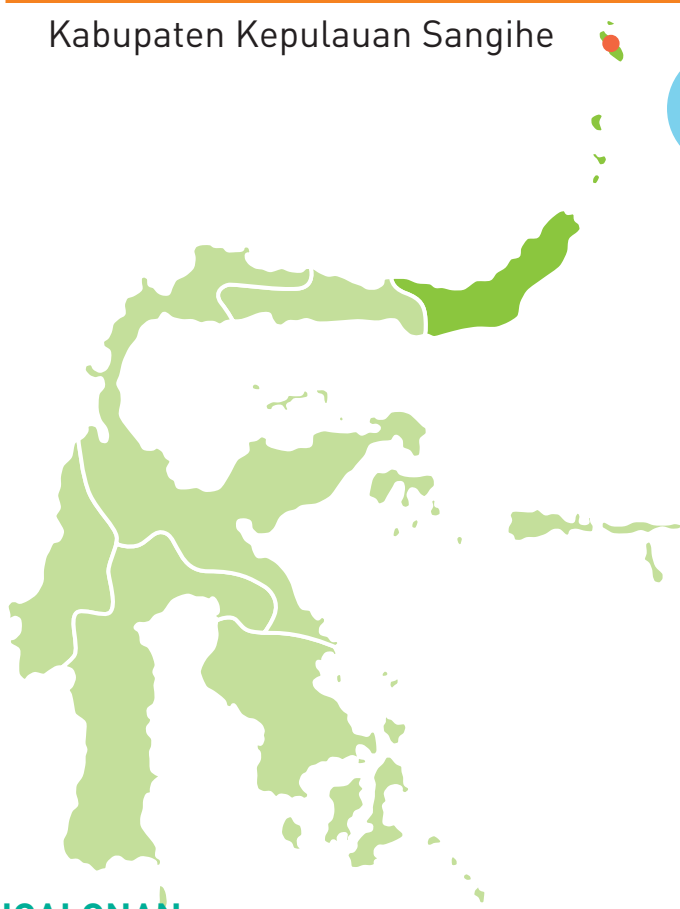
Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 5



# PROVINSI SULAWESI UTARA

Kabupaten Kepulauan Sangihe



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	53.113
	Perempuan	52.080
DPTb	Laki-laki	717
	Perempuan	752
DPPh	Laki-laki	199
	Perempuan	196

Jumlah Pemilih Pemula	2601
Jumlah Pemilih Disabilitas	260
Jumlah Pemilih TMS	17.120



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				2			



## ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 10.500.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 8.600.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**tepat**

Keterlambatan Waktu

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
41.642	41.788	711	749	184	193	42.537	42.730	84.636	631	184	



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	2

Pemungutan Suara Ulang	
Rekomendasi Panwas	Putusan MK
1	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	4
Mobilisasi PNS	12
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	2
Kampanye Masa Tenang	2

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
334	0	0	3	0	46	5	275	22	1842	937



Pencalonan (Tahapan)	0
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	1

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	13	Pelanggaran Pidana	25	Pelanggaran Etik	6	Pelanggaran Hukum Lainnya	16
--------------------------	----	--------------------	----	------------------	---	---------------------------	----



## PILKADA DI PROVINSI GORONTALO

**P**enyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Gorontalo terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pilkada di tingkat provinsi membutuhkan anggaran pengawasan sebesar Rp 35 miliar. Sementara, anggaran pengawasan di tingkat kabupaten membutuhkan anggaran sejumlah Rp 4 miliar. Pemberian anggaran pengawasan tersebut tidak diberikan sebesar jumlah yang diajukan. Pengawas Pilgub Provinsi Gorontalo hanya menerima anggaran pengawasan sebesar Rp 27.700.910.000,00, yang berarti anggaran pengawasan yang disetujui lebih rendah. Demikian pula pilkada di Kabupaten Boalemo, pengawas menerima anggaran pengawasan sejumlah Rp 3 miliar. Dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 tersebut baik di tingkat provinsi maupun kabupaten pencairan anggaran pengawasan berhasil diberikan tepat waktu.

Pada Pilgub Provinsi Gorontalo terdapat keunikan berupa jumlah personel pengawas perempuan lebih banyak dibandingkan pengawas laki-laki. Menurut hasil pendataan, jumlah pengawas perempuan sebanyak 1477 orang. Sebaliknya, jumlah pengawas laki-laki terhitung sebesar 1377 orang. Penyebaran pengawas perempuan tersebut terkonsentrasi di tingkat TPS yang diketahui terdapat 1161 perempuan bertugas sebagai pengawas. Hal serupa juga terjadi di pilkada

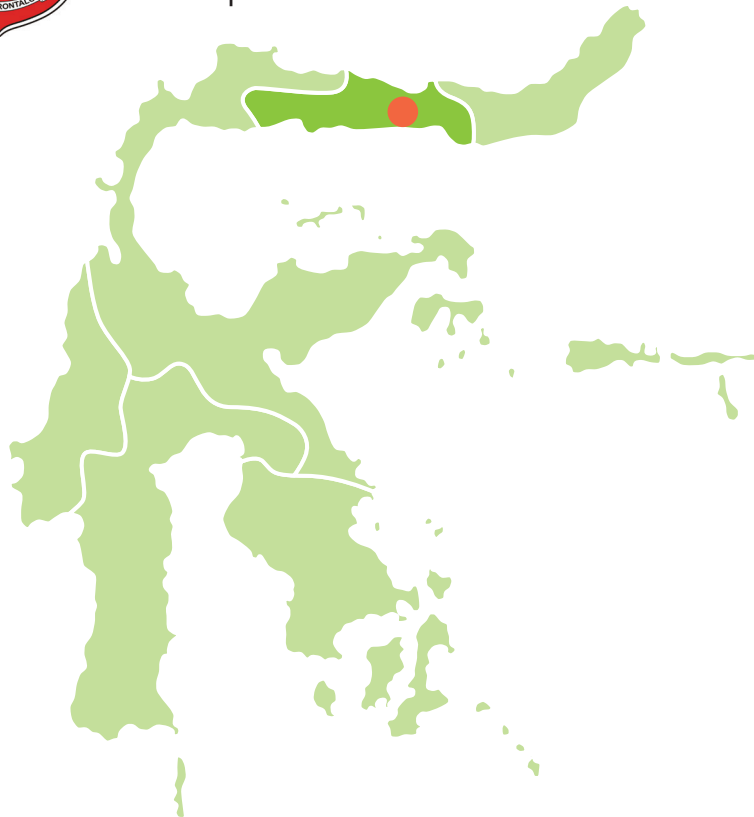
Kabupaten Boalemo yang menunjukkan jumlah pengawas perempuan paling banyak terdapat di tingkat pengawas TPS. Namun, di Kabupaten Boalemo jumlah keseluruhan pengawas perempuan tidak sebanyak pengawas laki-laki.

Berkaitan dengan isu SARA, penggunaan fasilitas negara, dan mobilisasi PNS, baik di tingkat Pilgub maupun di tingkat pilkada kabupaten, tidak ditemukan dugaan pelanggaran terkait hal tersebut. Namun, berdasarkan hasil pengawasan berhasil ditemukan dugaan kampanye jahat dan politik uang di Pilgub Provinsi Gorontalo. Kasus sengketa pencalonan juga terjadi di tingkat Pilgub Provinsi Gorontalo dan di tingkat pilkada Kabupaten Boalemo. Mengacu kepada hasil pengawasan ditemukan tiga kasus sengketa pencalonan di masing-masing pilkada tersebut. Hasil pengawasan di Pilgub Provinsi Gorontalo juga memperlihatkan bahwa pelanggaran yang kerap kali terjadi adalah pelanggaran administrasi. Kemudian, pelanggaran kedua terbesar adalah pelanggaran hukum lainnya. Sebaliknya, dalam konteks pilkada di Kabupaten Boalemo tidak terdapat pelanggaran yang mendominasi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa setiap jenis pelanggaran tercatat satu kasus pelanggaran.



# PROVINSI GORONTALO

## Kabupaten Gorontalo



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	39.4110
	Perempuan	39.7018
DPTb	Laki-laki	3.906
	Perempuan	4.003
DPPh	Laki-laki	1.413
	Perempuan	1.346

Jumlah Pemilih Pemula 27.929

Jumlah Pemilih Disabilitas 1.054

Jumlah Pemilih TMS 0



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	1	3	0	3	1	3	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Pason Petahana			
1				1			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 35.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 27.700.910.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**



## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
313.637	327.878	3.908	4.003	1.407	1.331	318.952	333.212	643.839	8.325	808	81,60%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	2	1	14	4	172	59	477	252	712	1.161



Pencalonan (Tahapan)	3
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	0

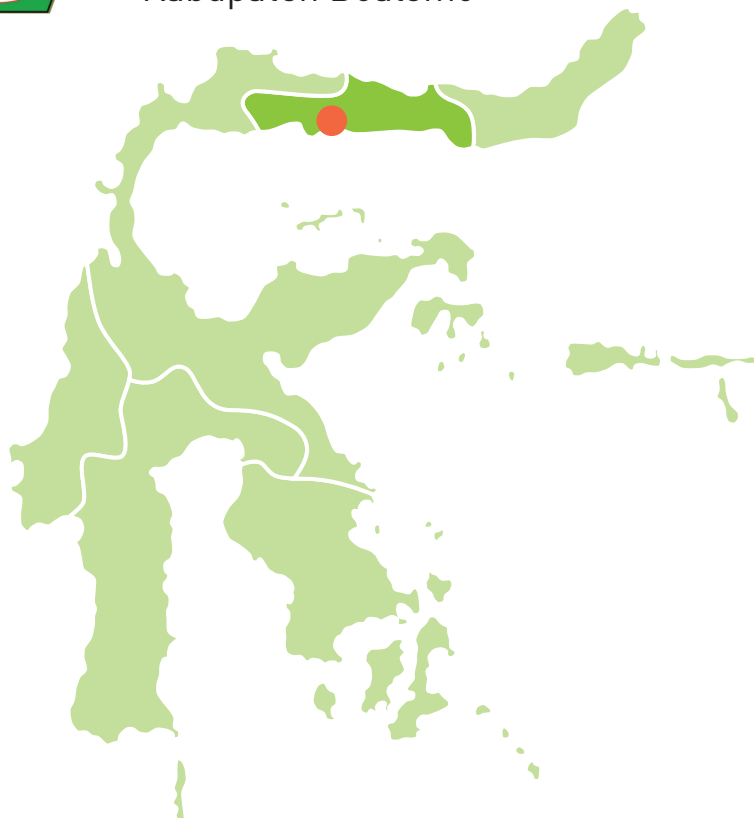
### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	14	Pelanggaran Pidana	1	Pelanggaran Etik	2	Pelanggaran Hukum Lainnya	4
--------------------------	----	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



# PROVINSI GORONTALO

## Kabupaten Boalemo



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	50.334
	Perempuan	49.078
DPTb	Laki-laki	557
	Perempuan	538
DPPH	Laki-laki	104
	Perempuan	80

Jumlah Pemilih Pemula	3.563
Jumlah Pemilih Disabilitas	199
Jumlah Pemilih TMS	0



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	3	0	1	2	2	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
1				1			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 4.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 3.000.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
41.628	41.345	557	538	68	49	42.253	41.932	8.123	2.955	167	84,30%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
	0	0	2	1	15	6	62	20	132	133



Pencalonan (Tahapan) 3

**SENGKETA**

Hasil 1

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 1

Pelanggaran Pidana 1

Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



## PILKADA DI SULAWESI TENGAH

Pada tahun 2017, ada dua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Buol. Pada penyelenggaraan Pilkada tersebut, anggaran pengawasan yang diterima Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp. 6.196.000.000,00 dari pengajuan anggaran sebesar Rp 6 miliar. Sementara itu, anggaran pengawasan yang diajukan Kabupaten Buol sebesar Rp 6 miliar dan jumlah anggaran yang disetujui sebesar Rp 5.344.843.000,00. Anggaran pengawasan tersebut berhasil dicairkan tepat waktu.

Jumlah personel pengawas di Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 451 orang, dengan rincian 408 orang laki-laki dan selebihnya 43 orang perempuan. Sedangkan, jumlah pengawas pemilu yang ada di Pilkada Kabupaten Buol berjumlah 446 orang yang mencakup 411 laki-laki dan 35 perempuan.

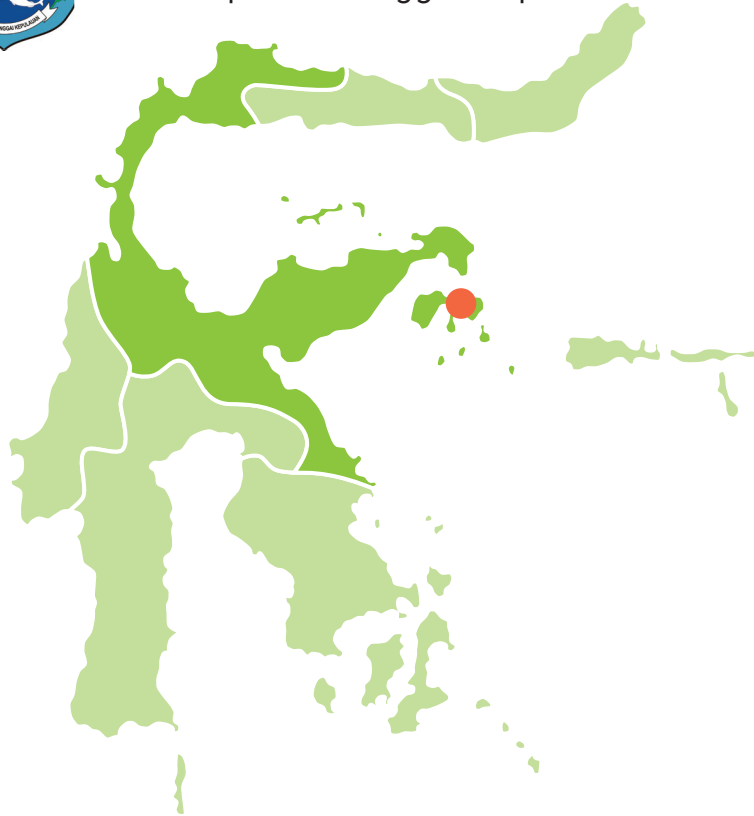
Berdasarkan hasil pengawasan di Kabupaten Banggai Kepulauan ditemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye. Dugaan pelanggaran tersebut meliputi satu dugaan pelanggaran kampanye hitam dan sepuluh dugaan politik uang. Sementara itu, dugaan pelanggaran dalam tahapan kampanye di Kabupaten Buol terdiri dari dua dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas negara, lima dugaan mobilisasi PNS, 1 dugaan kampanye hitam dan 1 dugaan politik uang.

Tercatat di Kabupaten Banggai Kepulauan terjadi satu kasus sengketa pencalonan dan satu gugatan sengketa hasil. Sedangkan, di Kabupaten Buol terdapat dua kasus sengketa pencalonan dan satu gugatan sengketa hasil. Terkait pelanggaran pilkada ditemukan lima kasus pelanggaran administrasi, satu pelanggaran pidana, dan satu kasus pelanggaran hukum lainnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Pelanggaran pilkada yang terdapat di Kabupaten Buol mencakup tujuh pelanggaran administrasi, dua pelanggaran pidana, dan dua pelanggaran hukum lainnya.



# PROVINSI SULAWESI TENGAH

## Kabupaten Banggai Kepulauan



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	39.911
	Perempuan	39.206
DPTb	Laki-laki	403
	Perempuan	409
DPPH	Laki-laki	131
	Perempuan	113

Jumlah Pemilih Pemula	2.354
Jumlah Pemilih Disabilitas	136
Jumlah Pemilih TMS	18.616



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
4	0	4	0	3	1	0	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
1				0			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 6.196.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 6.000.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**tepat (40 Hari)**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
33.731	33.538	401	409	131	112	34.263	34.059	67.813	509	112	85,30%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	11



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	10
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	32	4	105	39	268	



Pencalonan (Tahapan)	1
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	1

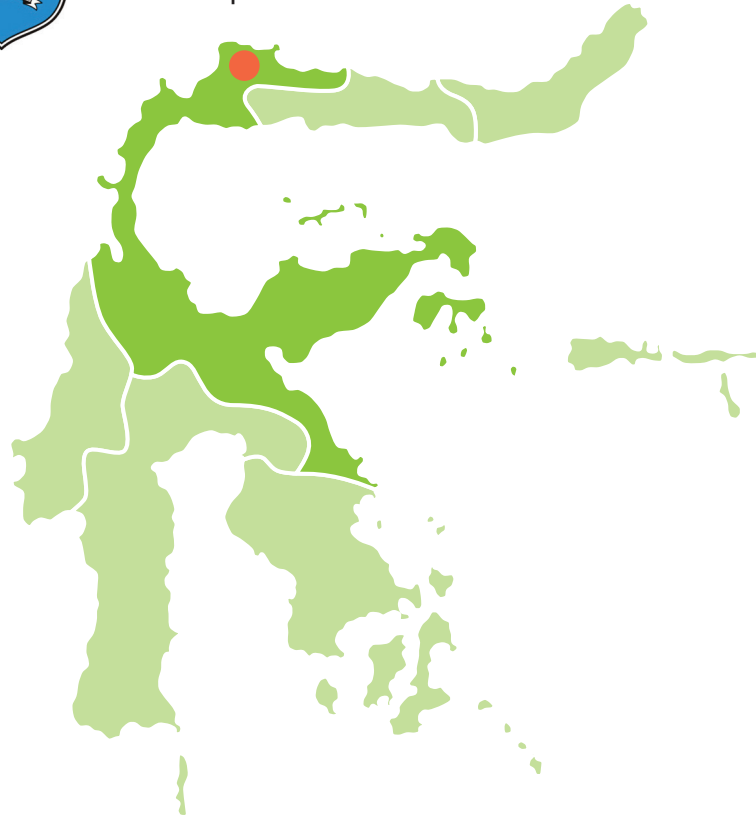
### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	5	Pelanggaran Pidana	1	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	1
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



# PROVINSI SULAWESI TENGAH

## Kabupaten Buol



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	49.293
	Perempuan	46.460
DPTb	Laki-laki	669
	Perempuan	675
DPPh	Laki-laki	199
	Perempuan	138

Jumlah Pemilih Pemula	3.794
Jumlah Pemilih Disabilitas	175
Jumlah Pemilih TMS	11.600



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	2	1	3	0	1	1
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
1				2			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 6.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 5.344.843.000,-**

Ketepatan Waktu

**tepat (30 Hari)**

Keterlambatan Waktu

**0**



## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
38.906	37.472	668	675	190	128	39.764	38.275	77.457	582	137	81,30%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	3

#### Pemungutan Suara Ulang

Rekomendasi Panwas	Putusan MK
2	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	2
Mobilisasi PNS	5
Kampanye Jahat (Hitam)	1
Politik Uang	2
Kampanye Masa Tenang	1

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	28	5	86	29	295	



Pencalonan (Tahapan) 2

**SENGKETA**

Hasil 1

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 7

Pelanggaran Pidana 2

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 2



## PILKADA DI SULAWESI TENGGARA

**P**enyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan di tujuh kabupaten/kota, yaitu Kota Kendari, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Buton. Pada penyelenggaraan Pilkada tersebut, Panitia Pengawas Kota Kendari menerima anggaran pengawasan sebesar Rp 7.115.054.000,00 sesuai dengan pengajuan. Demikian pula, Kabupaten Muna Barat menerima anggaran pengawasan sesuai dengan pengajuan sebesar Rp 5 miliar. Berbeda dengan Kabupaten Buton Selatan yang mendapatkan anggaran pengawasan lebih besar dibandingkan anggaran yang diajukan, yaitu Rp 6 miliar dari pengajuan sebesar Rp 4 miliar. Kabupaten Buton Tengah mengajukan anggaran pengawasan sejumlah Rp 6 miliar, namun anggaran yang disetujui sejumlah Rp 5 miliar. Anggaran pengawasan yang diterima oleh Kabupaten Bombana sebesar Rp 8.050.260.000,00 dari total pengajuan sebesar Rp 9 miliar. Sementara, Kabupaten Kolaka Utara menerima anggaran pengawasan sebesar Rp 6.879.000.000,00 sesuai dengan anggaran yang diajukan. Demikian pula, Kabupaten Buton menerima anggaran pengawasan sesuai dengan pengajuan sebesar Rp 5 miliar. Semua kabupaten/kota tersebut menerima anggaran pengawasan tepat waktu.

Jumlah pengawas pemilu di Pilkada Kota Kendari sebanyak 625 orang, dengan rincian 437 laki-laki dan 188 perempuan. Pengawas yang berada di Kabupaten Muna Barat berjumlah 237 orang. Sementara, Kabupaten Buton Selatan memiliki pengawas sebanyak 232 orang. Begitu pula, jumlah pengawas di Kabupaten Buton Tengah adalah 305 orang. Jumlah pengawas di Kabupaten Bombana terdiri dari 396 laki-laki dan 139 perempuan. Di Kabupaten Kolaka Utara terdapat 498 orang, pengawas dan di Kabupaten Buton berjumlah 342 orang.

Pada penyelenggaraan Pilkada Kota Kendari terjadi dua dugaan pelanggaran mobilisasi PNS, tiga dugaan politik uang, empat dugaan kampanye pada masa tenang, satu gugatan sengketa hasil, satu kasus pelanggaran administrasi, enam kasus pelanggaran pidana, satu kasus pelanggaran etik, dan empat kasus pelanggaran hukum lainnya. Kemudian, di Pilkada Kabupaten Muna Barat terjadi lima dugaan mobilisasi PNS, dua dugaan kampanye hitam, dua kasus sengketa pencalonan, satu kasus pelanggaran etik, dan lima kasus hukum lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Buton Selatan terjadi dua dugaan mobilisasi PNS, satu kasus sengketa hasil, sembilan kasus pelanggaran administrasi, satu kasus pelanggaran pidana, dua kasus pelanggaran etik, dan tiga pelanggaran hukum lainnya.

Selanjutnya, di Pilkada Kabupaten Buton Tengah terdapat tiga dugaan pelanggaran mobilisasi PNS, lima dugaan politik uang, satu kasus sengketa hasil, empat kasus pelanggaran administrasi dan dua pelanggaran hukum lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Bombana terdapat satu dugaan mobilisasi PNS, satu kasus politik uang, satu pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), satu kasus sengketa hasil, lima kasus pelanggaran administrasi, dua kasus pelanggaran pidana, dan lima kasus pelanggaran etik. Di pilkada Kolaka Utara terjadi tiga dugaan mobilisasi PNS, dua dugaan politik uang, satu dugaan kampanye pada masa tenang, dan enam kasus pelanggaran hukum lainnya. Terakhir, di Pilkada Buton terjadi tiga dugaan mobilisasi PNS, satu dugaan kampanye pada masa tenang, empat kasus sengketa pencalonan, tujuh kasus pelanggaran administrasi, satu kasus pelanggaran etik, dan dua pelanggaran hukum lainnya.



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

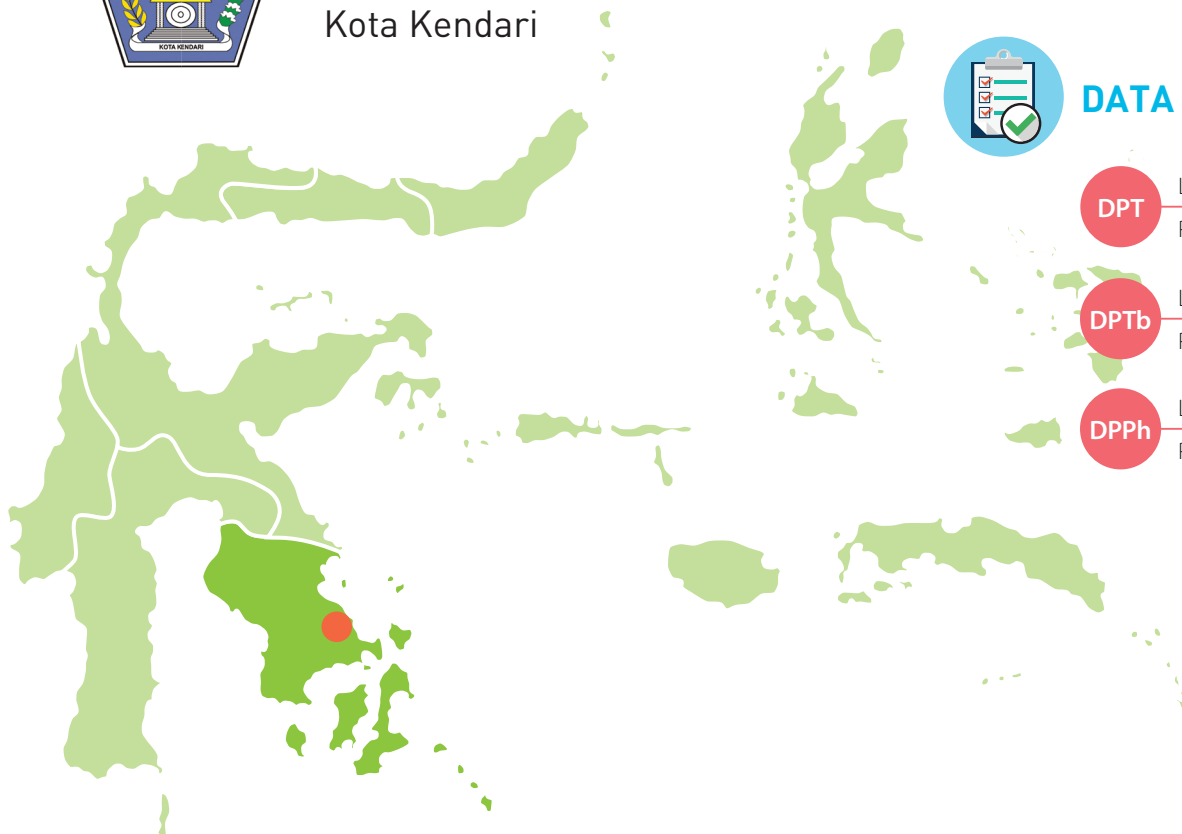
Kota Kendari



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	88.450
	Perempuan	90.964
DPTb	Laki-laki	5.617
	Perempuan	5.784
DPPh	Laki-laki	54
	Perempuan	51

Jumlah Pemilih Pemula	14.726
Jumlah Pemilih Disabilitas	152
Jumlah Pemilih TMS	1.658



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	2	1	3	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



## Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 7.115.054.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 7.115.054.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
68.494	72.619	5.531	5.696	53	51	74.078	78.366	151.289	155	130	79,85%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	65
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	4



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	2
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	3
Kampanye Masa Tenang	4

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	25	5	54	10	355	173



Pencalonan (Tahapan) 0

**SENGKETA**

Hasil 1

## PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 1

Pelanggaran Pidana 6

Pelanggaran Etik 1

Pelanggaran Hukum Lainnya 4



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## Kabupaten Muna Barat



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	25.094
	Perempuan	26.401
DPTb	Laki-laki	664
	Perempuan	866
DPPH	Laki-laki	39
	Perempuan	32

Jumlah Pemilih Pemula

Jumlah Pemilih Disabilitas

Jumlah Pemilih TMS



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 5.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 5.000.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
20.257	22.669	630	845	39	32	20.926	23.546	43.944	528	82	83,76%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	5
Kampanye Jahat (Hitam)	2
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	29	4	64	22	79	36



Pencalonan (Tahapan)	2
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	0

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	0	Pelanggaran Pidana	0	Pelanggaran Etik	1	Pelanggaran Hukum Lainnya	5
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

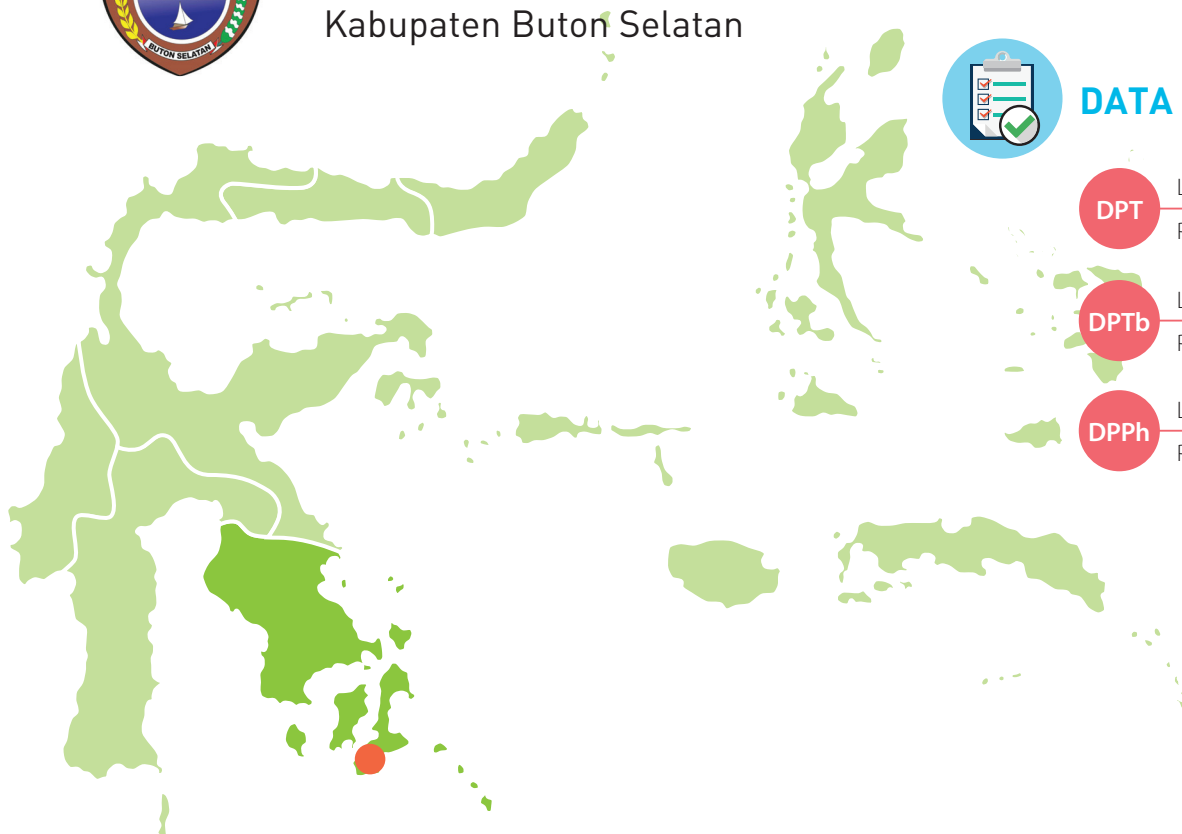
Kabupaten Buton Selatan



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	26.227
	Perempuan	26.601
DPTb	Laki-laki	938
	Perempuan	1.125
DPPh	Laki-laki	149
	Perempuan	185

Jumlah Pemilih Pemula	5.704
Jumlah Pemilih Disabilitas	86
Jumlah Pemilih TMS	464



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
4	0	3	1	3	1	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



## ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 4.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 6.000.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**



## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
17.343	20.900	931	1.125	16	18	18.290	22.043	40.043	290	83	73,03%



Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	4



## KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

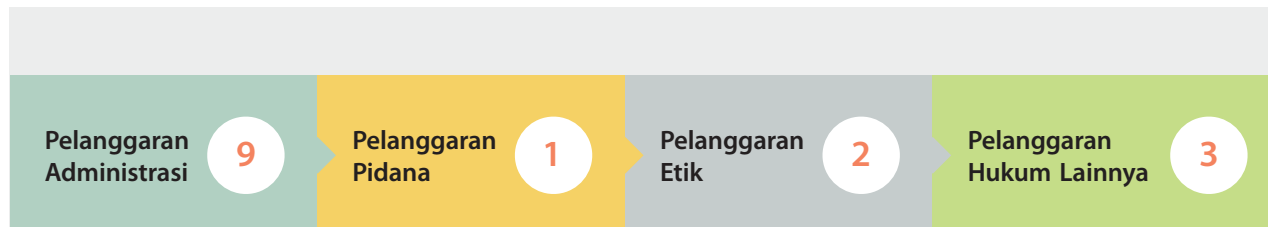
Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	2
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	17	4	55	15	84	54



Pencalonan (Tahapan)	0
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	1





# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

## Kabupaten Buton Tengah



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	37.553
	Perempuan	38.625
DPTb	Laki-laki	520
	Perempuan	727
DPPh	Laki-laki	53
	Perempuan	32

Jumlah Pemilih Pemula	6.367
Jumlah Pemilih Disabilitas	185
Jumlah Pemilih TMS	3



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 6.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 5.000.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
20680	26348	495	702	52	32	21227	27082	47790	528	174	62,33%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	15.392
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	1

#### Pemungutan Suara Ulang

Rekomendasi Panwas	Putusan MK
1	0



### PENGHITUNGAN SUARA

Gugatan  
0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	3
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	5
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	20	1	63	14	134	70



Pencalonan (Tahapan) 1

**SENGKETA**

Hasil 1

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 4

Pelanggaran Pidana 0

Pelanggaran Etik 0

Pelanggaran Hukum Lainnya 2



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

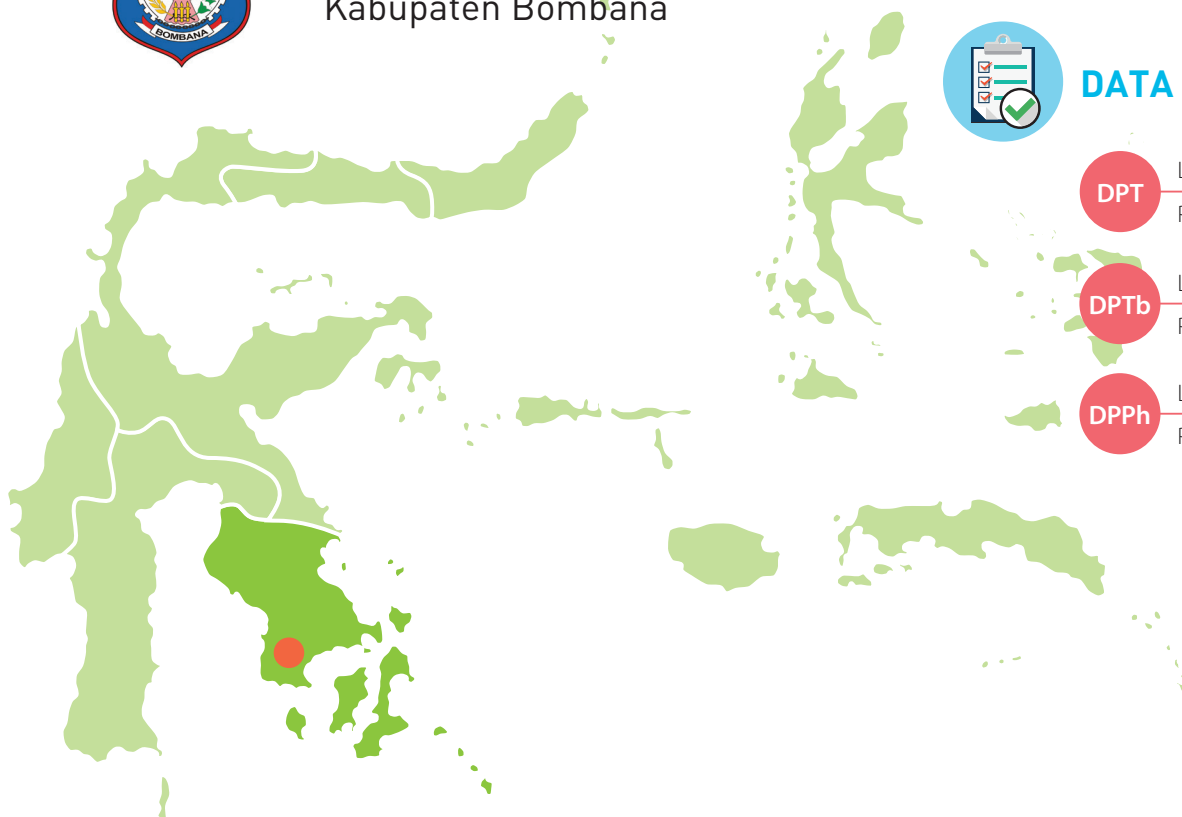
Kabupaten Bombana



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	49.862
	Perempuan	49.994
DPTb	Laki-laki	1.571
	Perempuan	1.777
DPPh	Laki-laki	220
	Perempuan	130

Jumlah Pemilih Pemula	6.979
Jumlah Pemilih Disabilitas	87
Jumlah Pemilih TMS	50



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
2				0			



## Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 9.000.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 8.050.260.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
38.579	39.307	1.548	1.754	219	128	40.346	41.189	80.718	817	76	78,84%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	7

#### Pemungutan Suara Ulang

Rekomendasi Panwas	Putusan MK
0	1



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	1
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	1
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			2	1	58	8	122	21	214	109



Pencalonan (Tahapan) 0

### SENGKETA

Hasil 1

## PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi 5

Pelanggaran Pidana 2

Pelanggaran Etik 5

Pelanggaran Hukum Lainnya 0



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

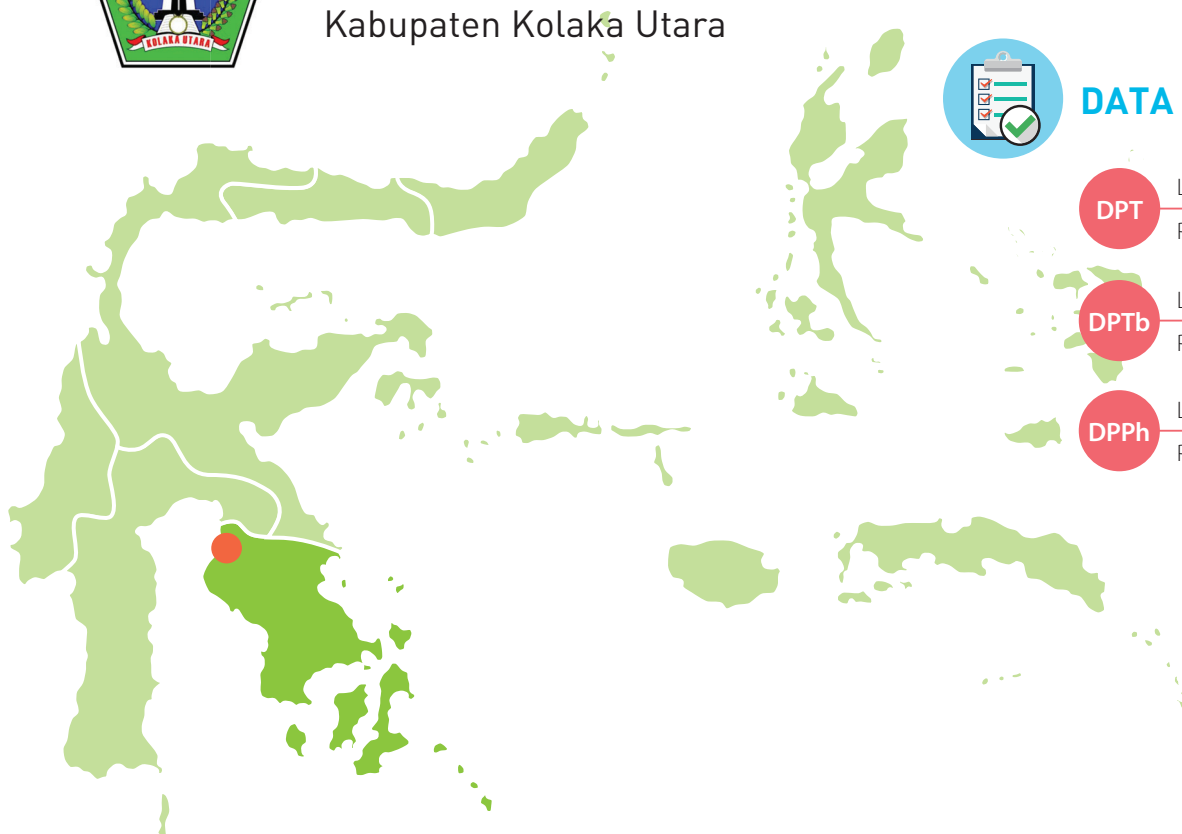
Kabupaten Kolaka Utara



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	47.360
	Perempuan	45.666
DPTb	Laki-laki	1.635
	Perempuan	1.617
DPPh	Laki-laki	170
	Perempuan	147

Jumlah Pemilih Pemula	7.039
Jumlah Pemilih Disabilitas	87
Jumlah Pemilih TMS	1677



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	3	0	3	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				1			



## ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 6.879.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 6.879.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**tepat**

Keterlambatan Waktu

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
36.278	35.518	1.633	1.611	169	146	38.080	37.275	74.903	452	53	78,01%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	2



Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	3
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	2
Kampanye Masa Tenang	1

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	37	8	96	38	208	108



Pencalonan (Tahapan)	0
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	0

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	0	Pelanggaran Pidana	0	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	6
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

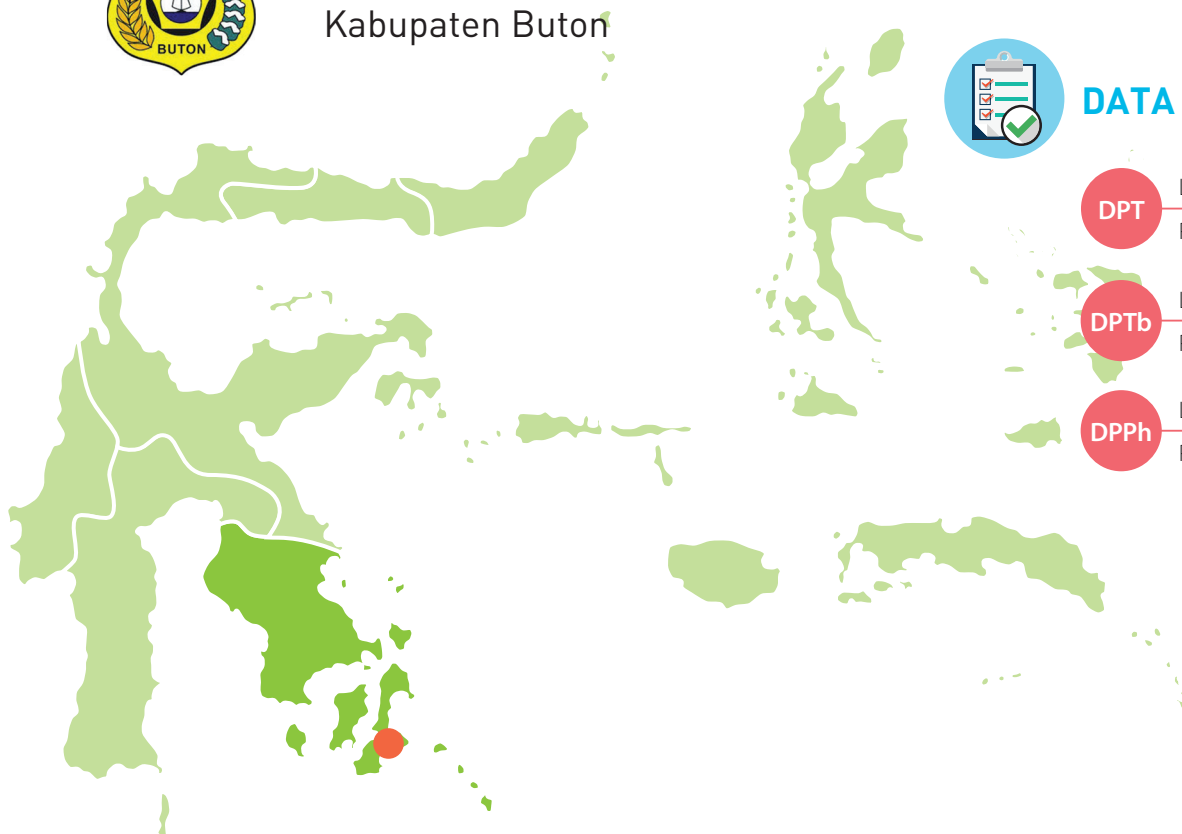
Kabupaten Buton



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	35.724
	Perempuan	35.803
DPTb	Laki-laki	137
	Perempuan	142
DPPh	Laki-laki	25
	Perempuan	15

Jumlah Pemilih Pemula	6.395
Jumlah Pemilih Disabilitas	79
Jumlah Pemilih TMS	397



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
1	0	1	0	1	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
1				2			



## ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan	Rp 5.000.000.000,-
Yang Disetujui	Rp 5.000.000.000,-

Ketepatan Waktu

Tepat

Keterlambatan Waktu

0



## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
23773	26522	137	142	25	15	23935	26679	49959	655	68	70,45%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	0
Kekurangan Surat Suara	757
Kerusakan Logistik	450
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	3
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	0
Kampanye Masa Tenang	1

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
			3	0	18	3	88	17	153	60



Pencalonan (Tahapan)	4
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	0

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	7	Pelanggaran Pidana	0	Pelanggaran Etik	1	Pelanggaran Hukum Lainnya	2
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	---



## PILKADA DI SULAWESI BARAT

Pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Barat menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diikuti oleh tiga pasangan calon. Tidak ada calon petahana dan ketiga pasangan diusung oleh partai politik. Penyelenggaraan pilkadadi Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan anggaran pengawasan sebesar Rp39.625.125.000,00. Namun, anggaran pengawasan yang disetujui sejumlah Rp24.002.405.000,00. Pencairan anggaran pengawasan tersebut diberikan tepat waktu.

Pengawasan pilkada di provinsi Sulawesi Barat dilakukan oleh 3.602 pengawas yang meliputi 2.433 pengawas laki-laki dan 1.169 pengawas perempuan. Hasil Pengawasan pada pilkada di provinsi Sulawesi Barat

pada tahapan kampanye terdapat delapan dugaan pelanggaran politik uang. Tidak ada temuan atau laporan terkait isu SARA, penggunaan fasilitas negara, mobilisasi PNS dan kampanye pada masa tenang. Pada tahapan pemungutan suara, Bawaslu Sulawesi Barat menemukan 86.420 formulir C6 yang tidak terdistribusikan. Selain itu, ditemukan sepuluh pelanggaran dalam proses pemungutan suara. Atas rekomendasi Panwas, dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS. Bawaslu Sulawesi Barat juga menemukan 15 pelanggaran administrasi, 12 pelanggaran pidana, 16 pelanggaran etik, dan 24 pelanggaran jenis lainnya.



# PROVINSI SULAWESI BARAT

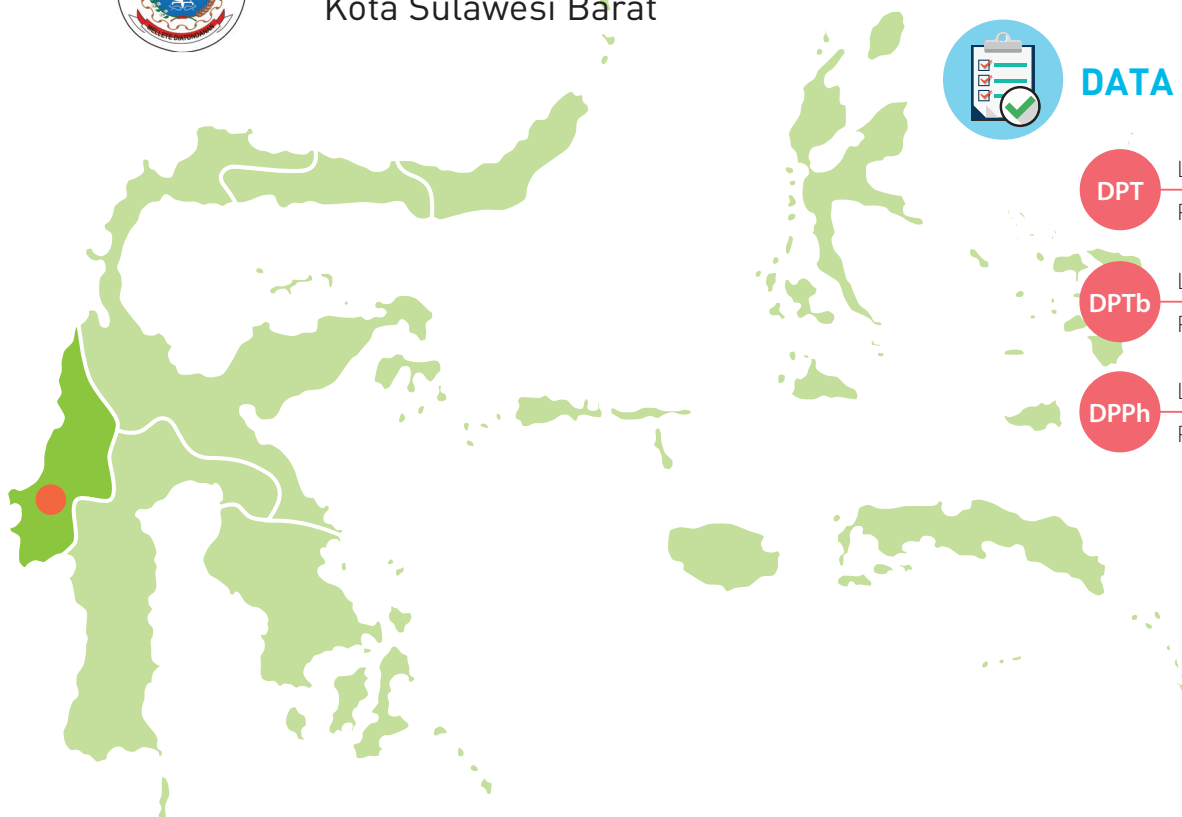
Kota Sulawesi Barat



## DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	420.076
	Perempuan	420.015
DPTb	Laki-laki	8.588
	Perempuan	8.751
DPPh	Laki-laki	1.694
	Perempuan	999

Jumlah Pemilih Pemula	33.291
Jumlah Pemilih Disabilitas	1.303
Jumlah Pemilih TMS	86.420



## PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
3	0	2	1	3	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				0			



## ANGGARAN

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 39.625.125.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 24.002.405.000,-**

Ketepatan Waktu

**Tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**

## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPH		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
303.221	316.187	8.375	8.524	1.667	966	313.263	325.677	631.547	7.393	668	74,28%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	86.420
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	10

Pemungutan Suara Ulang	
Rekomendasi Panwas	Putusan MK
1	0



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	0
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	8
Kampanye Masa Tenang	0

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
3605	3	0	14	1	187	20	533	115	1.696	1.033



Pencalonan (Tahapan)	0
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	1

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	15	Pelanggaran Pidana	12	Pelanggaran Etik	16	Pelanggaran Hukum Lainnya	24
--------------------------	----	--------------------	----	------------------	----	---------------------------	----



## PILKADA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

**P**ilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan di satu daerah, yaitu Kabupaten Takalar. Ada dua pasangan calon yang menjadi kontestan pilkada di wilayah ini, salah satu paslon merupakan petahana.

Hal menarik dari anggaran pengawasan di Pilkada Takalar ini adalah besaran anggaran yang dialokasikan lebih besar dari anggaran yang diajukan oleh Panwas. Dari angka Rp4,8 miliar yang diajukan oleh Panwas Takalar, Pemerintah daerah mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar. Baik proses penandatanganan NPHD maupun penyaluran dana pengawasan tidak mengalami kendala dan dapat dilakukan tepat waktu.

Untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Takalar, Bawaslu membentuk jajaran pengawas dari level kabupaten hingga Pengawas TPS sebanyak 481 orang. Pengawas yang bertugas tersebut meliputi 305 orang laki-laki dan 176 orang perempuan. Persebaran pengawas perempuan terbesar berada di tingkat pengawas TPS.

Hasil pengawasan sepanjang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Takalar berhasil ditemukan 12 dugaan kasus pelanggaran PNS yang terdiri dari 10 temuan oleh Panwas dan dua laporan masyarakat. Terkait dugaan kasus politik uang, ada dua laporan masyarakat yang masuk ke Panwas Takalar. Sedangkan terkait dugaan kampanye di masa tenang, ada satu laporan yang berasal dari masyarakat. Sementara itu, isu SARA dan kampanye hitam tidak ditemukan pada Pilkada Takalar. Namun, pada tahapan pemungutan suara terdapat 1.000 lembar Form C6 yang tidak terdistribusi.

Hasil Pilkada Takalar juga menunjukkan bahwa pasangan petahana dikalahkan oleh penantangannya dengan selisih suara cukup tipis. Pasangan petahana mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusannya, MK memutuskan menolak keseluruhan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu tersebut.



# PROVINSI SULAWESI SELATAN

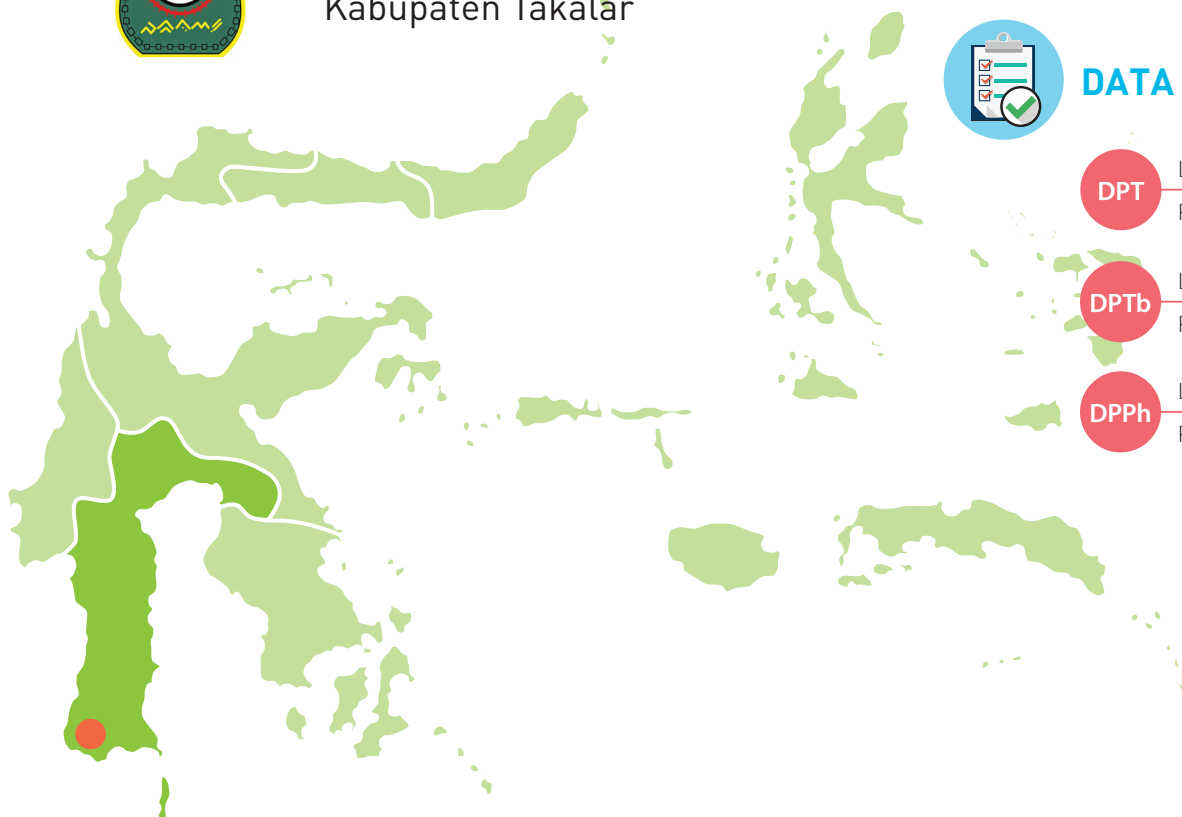
## Kabupaten Takalar



### DATA PEMILIH

DPT	Laki-laki	97.177
	Perempuan	108.241
DPTb	Laki-laki	2.294
	Perempuan	2.502
DPPh	Laki-laki	92
	Perempuan	63

Jumlah Pemilih Pemula	6.628
Jumlah Pemilih Disabilitas	607
Jumlah Pemilih TMS	0



### PENCALONAN

Jumlah Calon Kepala Daerah		Jumlah Calon Wakil Kepala Daerah		Jumlah Dukungan Pasangan Calon		Putusan Pencalonan Oleh Panwas	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Partai Politik	Perseorangan	Dikabulkan	Diskualifikasi
2	0	2	0	2	0	0	0
Jumlah Bakal Pasangan Calon TMS				Jumlah Paslon Petahana			
0				2			



### ANGGARAN

#### Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Yang Diajukan

**Rp 4.800.000.000,-**

Yang Disetujui

**Rp 5.000.000.000,-**

Ketepatan Waktu

**tepat**

Keterlambatan Waktu

**0**



## DATA PENGGUNA HAK PILIH

DPT		DPTb		DPPh		Jumlah Pemilih		Jumlah Suara		Jumlah Pemilih Disabilitas	Tingkat Partisipasi
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Sah	Tidak Sah		
78.202	92.262	2.294	2.502	91	63	80.587	94.827	174.203	1.211	190	83,5%



### PEMUNGUTAN SUARA

Form C6 Yang Tidak Terdistribusi	1.000
Kekurangan Surat Suara	0
Kerusakan Logistik	0
Pelanggaran dalam Proses Pemungutan Suara	1



### KAMPANYE (TEMUAN & LAPORAN)

Isu SARA	0
Penggunaan Fasilitas Negara	0
Mobilisasi PNS	12
Kampanye Jahat (Hitam)	0
Politik Uang	2
Kampanye Masa Tenang	1

## REKRUTMEN PENGAWAS

Jumlah Pengawas (Prov/Kab/ Kota/Kec Kel/Desa/TPS)	Bawaslu/Panwaslih		Panwas Kabupaten/Kota		Panwas Kecamatan		PPL		Pengawas TPS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
484	2	1	2	1	22	5	76	24	205	146



Pencalonan (Tahapan)	0
<b>SENGKETA</b>	
Hasil	1

### PELANGGARAN

Pelanggaran Administrasi	8	Pelanggaran Pidana	2	Pelanggaran Etik	0	Pelanggaran Hukum Lainnya	13
--------------------------	---	--------------------	---	------------------	---	---------------------------	----

